



BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

LAPORAN KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 015

TAHUN ANGGARAN 2018 (AUDITED)



2018

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2018, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Kebijakan Fiskal adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Bagian Anggaran 015 Tahun Anggaran 2018 (*Audited*) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Kebijakan Fiskal. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan sebagai usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, April 2019
Kepala Badan,



 Suahasil Nazara

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	vi
Daftar Lampiran	vii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
A.1. Profil Dan Kebijakan Teknis Badan Kebijakan Fiskal	8
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	10
A.3. Basis Akuntansi	11
A.4. Dasar Pengukuran	11
A.5. Kebijakan Akuntansi	11
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
B.1. Pendapatan	20
B.2. Belanja	20
B.3. Catatan Penting Lainnya	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	28
C.1. Aset Lancar	28
C.2. Aset Tetap	29
C.3. Aset Lainnya	34
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	37
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	38
D.1. Beban Operasional	38
D.2. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	42
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	43
E.1. Ekuitas Awal	43
E.2. Surplus (Defisit) LO	43
E.3. Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan	43
E.4. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	43
E.5. Transaksi Antar Entitas	43
E.6. Kenaikan/Penurunan Ekuitas	43
E.7. Ekuitas Akhir	44
F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	45
F.1. Tuntutan Ganti Rugi	45



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEBIJAKAN FISKAL

GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO LANTAI 3 JL. DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3812203; FAKSIMILE (021) 3812763; WEBSITE www.fiskal.depkeu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Bagian Anggaran 015 (*Audited*) Tahun Anggaran 2018 Badan Kebijakan Fiskal yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2019
Kepala Badan

✚ Suahasil Nazara ✚

DAFTAR TABEL

No.		Halaman
1.	Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2018 dan 2017	1
2.	Tabel 2 Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2018 dan 2017	2
3.	Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	17
4.	Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap	18
5.	Tabel 5 Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNB	20
6.	Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNB Per 31 Desember 2018 dan 2017	20
7.	Tabel 7 Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Kegiatan Tahun Anggaran 2018	21
8.	Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018	21
9.	Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018	22
10.	Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2018 dan 2017	23
11.	Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2018 dan 2017	23
12.	Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2018 dan 2017	24
13.	Tabel 13 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2018 dan 2017	28
14.	Tabel 14 Rincian Persediaan Per 31 Desember 2018 dan 2017	29
15.	Tabel 15 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2018 dan 2017	29
16.	Tabel 16 Rincian Tanah Per 31 Desember 2018 dan 2017	30
17.	Tabel 17 Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2018	30

DAFTAR TABEL

No.		Halaman
18.	Tabel 18 Rincian Penambahan Nilai Tanah Hasil Revaluasi Per 31 Desember 2018	31
19.	Tabel 19 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2018	34
20.	Tabel 20 Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2018 dan 2017	34
21.	Tabel 21 Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2018 dan 2017	35
22.	Tabel 22 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Per 31 Desember 2018	36
23.	Tabel 23 Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2018 dan 2017	38
24.	Tabel 24 Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2018 dan 2017	39
25.	Tabel 25 Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2018 dan 2017	39
26.	Tabel 26 Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2018 dan 2017	40
27.	Tabel 27 Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2018 dan 2017	40
28.	Tabel 28 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2018 dan 2017	41
29.	Tabel 29 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2018 dan 2017	41
30.	Tabel 30 Rincian Surplus/Defisit Per 31 Desember 2018 dan 2017	42

DAFTAR GRAFIK

No		Halaman
1.	Grafik 1 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018	22

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
4. Laporan Operasional
5. Laporan Perubahan Ekuitas
6. Neraca
7. Neraca Percobaan
8. Memo Penyesuaian
9. Kertas Kerja Telaah
10. Surat Ijin Pembukaan Rekening
11. Berita Acara Pemeriksaan Realisasi Anggaran antara BKF dengan KPPN Jakarta II
12. Rekening Koran Per 31 Desember 2018
13. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
14. Berita Acara Rekonsiliasi BMN
15. Laporan Posisi BMN di Neraca
16. Laporan Persediaan
17. Laporan Pembantu Pengguna Barang Eselon I Intrakomptabel TA 2018
18. Laporan Pengguna Eselon I Ekstrakomptabel TA 2018
19. Laporan Pembantu Pengguna Barang Eselon I Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel TA 2018
20. Laporan Barang Pengguna Eselon I Aset Tak Berwujud TA 2018
21. Matrik Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK
22. Nota Kesepakatan Angka Asersi Final

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.024.026.198. Pada Tahun Anggaran 2018 Badan Kebijakan Fiskal tidak memiliki estimasi pendapatan.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp129.154.503.503 atau mencapai 81,08 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp156.296.684.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	31 DES 2018			31 DES 2017
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Negara		1.024.026.198	-	1.850.146.888
Belanja Negara	159.296.684.000	129.154.503.503	81,08	132.149.519.886

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Nilai Aset per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp34.569.577.531, yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp2.338.269.852, Aset Tetap sebesar Rp31.035.785.125 dan Aset Lainnya sebesar Rp1.195.522.554.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp18.189.235 dan Rp28.229.46.811.

Tabel 2
Ringkasan Neraca
Per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	31 DES 2018	31 DES 2017	Naik/(Turun)	%
Aset				
Aset Lancar	2.338.269.852	4.059.172.408	(1.720.902.556)	(42,40)
Aset Tetap	31.035.785.125	29.321.589.853	1.714.195.272	5,85
Aset Lainnya	1.195.522.554	137.936.750	1.057.585.804	766,72
Jumlah Aset	34.569.577.531	33.518.699.011	1.050.878.520	3,14
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	18.189.235	2.867.175.433	(2.848.986.198)	(99,37)
Jumlah Kewajiban	18.189.235	2.867.175.433	(2.848.986.198)	(99,37)
Ekuitas				
Ekuitas	34.551.388.296	30.651.523.578	3.899.864.718	12,72
Jumlah Ekuitas	34.551.388.296	30.651.523.578	3.899.864.718	12,72
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	34.569.577.531	33.518.699.011	1.050.878.520	3,14

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO. Beban surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp15.638.830 dan terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp130.795.821.122. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar surplus Rp921.496.435 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp129.874.324.687.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp30.651.523.578 ditambah Defisit-LO sebesar Rp129.874.324.687, kemudian transaksi antar entitas senilai Rp133.774.189.405, sehingga ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp34.551.388.296.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2018, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN KEBIJAKAN FISKAL LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

Uraian	Catatan	31 DES 2018			31 DES 2017
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN	B.1				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	1.024.026.198		1.850.146.888
Jumlah Pendapatan		-	1.024.026.198	-	1.850.146.888
BELANJA	B.2				
1. Belanja Pegawai	B.2.1	36.153.957.000	34.687.978.698	95,95	33.313.923.286
2. Belanja Barang	B.2.2	110.962.897.000	82.762.099.610	74,59	82.568.813.605
3. Belanja Modal	B.2.3	12.179.830.000	11.704.425.195	96,10	16.266.782.995
Jumlah Belanja		159.296.684.000	129.154.503.503	81,08	132.149.519.886

II. NERACA

**BADAN KEBIJAKAN FISKAL
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2018	31 DES 2017
ASET			
Aset Lancar			
	C.1		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.1	5.238.830	3.002.038.903
Piutang Bukan Pajak	C.1.2	8.995.407	17.990.765
Persediaan	C.1.3	2.324.035.615	1.039.142.740
Jumlah Aset Lancar		2.338.269.852	4.059.172.408
Aset Tetap			
	C.2		
Tanah	C.2.1	2.598.368.000	2.598.368.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	94.817.604.947	90.258.600.917
Gedung dan Bangunan	C.2.3	2.959.470.000	2.959.470.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	1.257.708.832	1.257.708.832
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	2.467.761.364	484.966.089
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	79.217.600	
Akumulasi Penyusutan	C.2.7	(73.144.345.618)	(68.237.523.985)
Jumlah Aset Tetap		31.035.785.125	29.321.589.853
Aset Lainnya			
	C.3		
Aset Tak Berwujud	C.3.1	2.277.280.500	931.221.500
Aset Lain-Lain	C.3.2	611.994.099	1.667.505.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(1.693.752.045)	(2.460.789.750)
Jumlah Aset Lainnya		1.195.522.554	137.936.750
JUMLAH ASET		34.569.577.531	33.518.699.011
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
	C.4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1	18.189.235	2.867.175.433
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		18.189.235	2.867.175.433
JUMLAH KEWAJIBAN		18.189.235	2.867.175.433
EKUITAS			
	C.5		
Ekuitas		34.551.388.296	30.651.523.578
JUMLAH EKUITAS		34.551.388.296	30.651.523.578
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		34.569.577.531	33.518.699.011

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN KEBIJAKAN FISKAL LAPORAN OPERASIONAL PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2018	31 DES 2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Operasional	D.1		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1.1	15.638.830	0
Jumlah Pendapatan Operasional		15.638.830	0
Beban Operasional	D.2		
Beban Pegawai	D.2.1	34.679.325.630	33.317.967.100
Beban Persediaan	D.2.2	1.880.458.662	2.386.973.846
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	39.976.127.058	42.493.593.771
Beban Pemeliharaan	D.2.4	6.891.882.326	5.355.309.016
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	38.451.067.359	41.123.365.298
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.6	8.932.644.119	8.601.584.768
Beban Penyusutan Piutang tak Tertagih	D.2.7	(45.202)	(45.203)
Jumlah Beban Operasional		130.811.459.952	133.278.748.596
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(130.795.821.122)	(133.278.748.596)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
	D.3		
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Operasional	D.3.1		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		443.596.000	1.171.566.561
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	423.635.683
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		443.596.000	747.930.878
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.2		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		619.011.887	726.068.966
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		141.111.452	6.919.424
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		477.900.435	719.149.542
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		921.496.435	1.467.080.420
SURPLUS / (DEFISIT) - LO		(129.874.324.687)	(131.811.668.176)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN KEBIJAKAN FISKAL LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2018	31 DES 2017
EKUITAS AWAL	E.1	30.651.523.578	18.434.817.884
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(129.874.324.687)	(131.811.688.176)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN	E.3	0	1.852.710.055
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		0	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP			1.852.710.055
KOREKSI NILAI ASEP TETAP NON REVALUASI			0
LAIN-LAIN			
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	133.774.189.405	142.275.357.815
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	3.899.864.718	12.216.705.694
EKUITAS AKHIR	E.6	34.551.388.296	30.651.523.578

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Dasar Hukum Badan Kebijakan Fiskal (BKF) adalah unit eselon I di Kementerian Keuangan yang pembentukannya dimaksudkan untuk membantu Menteri Keuangan dalam merumuskan kebijakan fiskal secara langsung maupun kebijakan ekonomi yang terkait dengan fiskal dalam rangka menciptakan kondisi fiskal yang berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi kebijakan ekonomi makro, kebijakan APBN, kebijakan pendapatan negara yang meliputi kebijakan pajak, penerimaan negara bukan pajak, kepabeanan, dan cukai serta kebijakan sektor keuangan. Selain itu, mengingat keberhasilan kebijakan ekonomi nasional juga sangat ditentukan oleh dukungan lingkungan eksternal, BKF juga menjalankan fungsi kerjasama kebijakan kerjasama internasional, baik di tingkat bilateral, regional, dan multilateral.

Mengingat lingkup tugas perumusan kebijakan yang bersifat nasional, BKF melakukan koordinasi intensif dengan unit-unit eselon I di dalam Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga lain yang terkait, seperti Bank Indonesia, Bappenas, dan Kementerian sektoral lainnya. Kerjasama dan koordinasi intensif yang mempunyai dampak kebijakan fiskal tersebut harus dapat dijaga sustainabilitasnya, dan di sisi lain mempunyai kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pembangunan yang berkualitas, yang mencakup antara lain dukungan terhadap penciptaan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Kondisi perekonomian nasional dan dukungan kebijakan fiskal yang dinamis dalam beberapa tahun terakhir mendorong kepada transformasi organisasi BKF agar dapat mempunyai daya dukung yang lebih optimal. Sejak awal pembentukannya tahun 2006 (Peraturan Presiden nomor 66 Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006 dengan susunan organisasi yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006), BKF telah mengalami 3 (tiga) kali reorganisasi yang lebih dimaksudkan untuk penajaman berbagai fungsi organisasi sesuai dengan kondisi dinamis dan prioritas arah kebijakan Kementerian Keuangan. Perubahan struktur organisasi BKF terakhir ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dengan susunan organisasi yang terdiri dari:

1. Sekretariat Badan
2. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
3. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
5. Pusat Kebijakan Sektor Keuangan
6. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral
7. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral

Visi

Visi Kementerian Keuangan adalah menjadi Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Yang Inklusif di Abad ke-21.

Untuk mendukung tercapainya visi Kementerian Keuangan tersebut, Badan Kebijakan Fiskal sebagai salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan mempunyai visi: Menjadi menjadi Unit Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Antisipatif dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera.

Yang dimaksud dengan Unit Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal adalah Badan Kebijakan Fiskal diharapkan dapat menghasilkan rumusan rekomendasi kebijakan yang handal dan *aplicable* sehingga diakui dan dipercaya oleh pimpinan Kementerian Keuangan pada khususnya dan masyarakat pelaku ekonomi pada umumnya. Antisipatif artinya handal dalam merencanakan berbagai kegiatan analisis dan kajian yang telah mempertimbangkan kondisi perekonomian jauh ke depan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan fiskal sehingga rumusan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan *aplicable* dan dapat menjadi solusi permasalahan yang ada. Responsif, artinya adanya tantangan ketidakpastian perekonomian global dan kondisi dalam negeri yang belum kondusif, Badan Kebijakan Fiskal harus selalu siap menghadapi gejala perekonomian yang terjadi dengan cara melakukan analisis dan menyampaikan rekomendasi yang cepat dan handal untuk mengatasi permasalahan yang muncul.

Misi

Untuk mencapai visi menjadi Unit Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Antisipatif dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera, BKF mengemban misi:

1. Merumuskan analisis ekonomi makro serta harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter dalam rangka mendukung stabilitas ekonomi dan pemerataan pembangunan.
2. Mengembangkan kebijakan penerimaan negara yang kredibel dalam rangka penciptaan iklim ekonomi yang kondusif dan optimalisasi penerimaan negara.

3. Mengembangkan kebijakan anggaran negara yang sehat dan berkelanjutan dengan memperhatikan risiko fiskal yang terukur.
4. Mengembangkan kebijakan pembiayaan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan fiskal yang berkelanjutan.
5. Mengembangkan kebijakan kerja sama keuangan internasional yang bermanfaat bagi perekonomian nasional.
6. Mengembangkan kebijakan sektor keuangan yang mendukung pendalaman pasar, keuangan inklusif, serta stabilitas sistem keuangan.
7. Mewujudkan SDM yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi dengan didukung teknologi informasi dan komunikasi yang andal, serta kinerja perencanaan dan penganggaran yang suportif.

Tujuan strategis BKF yang ingin dicapai adalah terwujudnya rumusan kebijakan fiskal yang dapat dilaksanakan, tepat waktu, dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, BKF telah menetapkan beberapa sasaran strategis yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Kebijakan yang Berkualitas
2. Kerja sama Ekonomi dan Keuangan Internasional yang Optimal
3. Informasi Kebijakan dan Kajian Fiskal yang Efektif
4. Pemantauan Perkembangan Ekonomi Keuangan yang Efektif
5. Analisis dan Kajian dengan Pendekatan Ilmiah
6. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompetitif
7. Organisasi yang Kondusif
8. Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi
9. Pelaksanaan Anggaran yang Optimal

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BA 015 Badan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2018 *Unaudited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Kebijakan Fiskal. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan BA 015 Badan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2018 *Unaudited* merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Badan Kebijakan Fiskal. Jumlah satuan

kerja di lingkup Badan Kebijakan Fiskal adalah satu satker.

SAKTI dalam Pelaporan Keuangan terdiri dari Modul Pelaporan, Modul Persediaan, dan Modul Aset Tetap. Modul Pelaporan dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Badan Kebijakan Fiskal menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Dasar

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Kebijakan Fiskal dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kebijakan Fiskal adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang berhak menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Kebijakan Fiskal tidak terdapat pendapatan yang termasuk pendapatan-LO.

Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban **(4) Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset **(5) Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar **a. Aset Lancar**

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca

disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2018. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018.

Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilai berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilai selain Tanah.

Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi hasil perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambahan ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dan entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Piutang Jangka Panjang

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang antara lain adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau

perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari

dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 3
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Penyusutan Aset
Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 01/KMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4
Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (alat music Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama Kali*

(10) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintah. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos

ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, Perbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**B.1 Pendapatan***Realisasi**Pendapatan**Rp1.024.026.198*

Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.024.026.198. Dalam DIPA Badan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2018 tidak memiliki estimasi pendapatan. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah adalah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasi PNBP lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Tabel 5
Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP

No.	Uraian	Estimasi	Realisasi	% Naik/ (Turun)
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	443.596.000	-
2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	10.400.000	-
3	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	0	48.542.400	-
4	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	0	92.093.010	-
5	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	0	429.394.788	-
Jumlah		0	1.024.026.198	-

Realisasi PNBP Lainnya Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp826.120.690 atau 80,67 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2017. Penurunan tersebut terutama bersumber dari Pemindahtanganan BMN Lainnya. Perbandingan realisasi PNBP Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6
Perbandingan Realisasi PNBP
Per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Uraian	31 DES 2018	31 DES 2017	Kenaikan / (Penurunan)	
				Rp	%
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	443.596.000	1.171.566.561	(727.970.561)	(62,14)
2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	10.400.000	-	10.400.000	
3	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	48.542.400	16.215.156	32.327.244	100,00
4	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	92.093.010	198.875.361	(106.782.351)	(53,69)
5	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	429.394.788	463.489.810	(34.095.022)	(7,36)
Jumlah		1.024.026.198	1.850.146.888	(826.120.690)	(80,67)

B.2. Belanja*Realisasi Belanja**Rp129.154.503.503*

Realisasi belanja Badan Kebijakan Fiskal per kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7
Anggaran dan Realisasi Belanja per kegiatan
Tahun Anggaran 2018

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Belanja	%
1740	Perumusan Kebijakan APBN	8.950.304.000	6.229.945.743	69,61
1741	Perumusan Kebijakan Ekonomi	10.181.117.000	7.490.223.994	73,57
1742	Perumusan Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral	12.261.376.000	9.810.586.715	80,01
1743	Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNPB	11.838.095.000	10.848.857.784	91,64
1744	Perumusan Kebijakan Sektor Keuangan	7.632.705.000	5.961.004.781	78,10
1745	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Kebijakan Fiskal	96.550.250.000	78.722.355.628	81,54
5135	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral	11.882.837.000	10.121.153.674	85,17
Jumlah		159.296.684.000	129.184.128.319	81,10
Pengembalian Belanja			29.624.816	
Belanja Netto		159.296.684.000	129.154.503.503	81,08

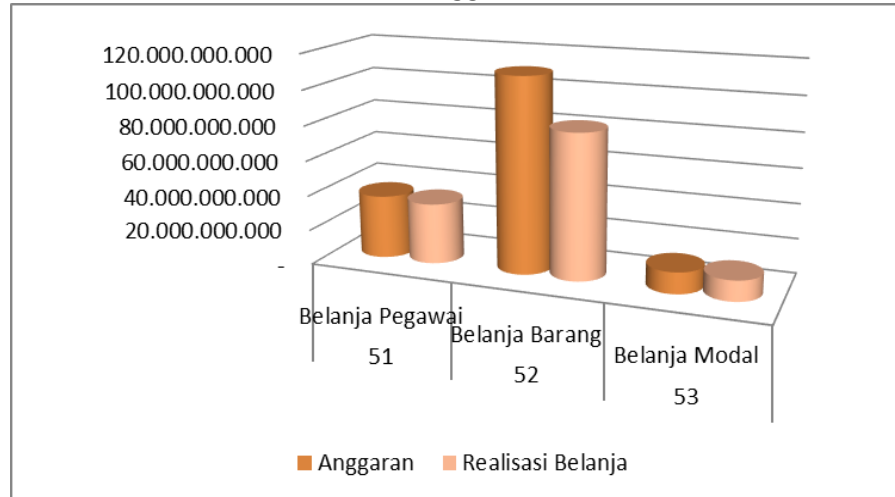
Realisasi belanja Badan Kebijakan Fiskal pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp129.154.503.503 atau sebesar 81,08 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp29.624.816. Anggaran dan realisasi belanja menurut jenis belanja Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2018

Kode Jenis Belanja	Uraian	Anggaran	Realisasi Belanja	% Naik / Turun
51	Belanja Pegawai	36.153.957.000	34.687.978.698	95,95
52	Belanja Barang	110.962.897.000	82.762.099.610	74,59
53	Belanja Modal	12.179.830.000	11.704.425.195	96,10
Jumlah		159.296.684.000	129.154.503.503	81,08

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Grafik 1
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2018



Realisasi belanja Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp2.995.016.383 dibandingkan Tahun Anggaran 2017 disebabkan oleh pelaksanaan efisiensi pada BKF dan adanya *selfblocking*. Perbandingan realisasi belanja per 31 Desember 2018 dan 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 9
Perbandingan realisasi Belanja
Per 31 Desember 2018 dan 2017

Kode	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Naik / (Turun)	
		31 DES 2018	31 DES 2017	Rp	%
51	Belanja Pegawai	34.687.978.698	33.313.923.286	1.374.055.412	4,12
52	Belanja Barang	82.762.099.610	82.568.813.605	193.286.005	0,23
53	Belanja Modal	11.704.425.195	16.266.782.995	(4.562.357.800)	(28,05)
	Jumlah	129.154.503.503	132.149.519.886	(2.995.016.383)	(2,27)

Belanja Pegawai
Rp34.687.978.698

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp34.687.978.698 sedangkan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp33.313.923.286. Kenaikan realisasi belanja pegawai sebesar 4,12 persen.

Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10
Perbandingan Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	31 DES 2018	31 DES 2017	Naik/ (Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	23.575.533.680	23.163.337.900	412.195.780	1,78
Belanja Pembulatan Gaji PNS	334.558	326.758	7.800	2,39
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.609.269.790	1.455.859.000	153.410.790	10,54
Belanja Tunj. Anak PNS	446.865.490	401.954.270	44.911.220	11,17
Belanja Tunj. Struktural PNS	1.928.880.000	1.668.520.000	260.360.000	15,60
Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.476.900.000	1.332.400.000	144.500.000	10,85
Belanja Tunj. PPh PNS	148.288.111	100.293.644	47.994.467	47,85
Belanja Tunj. Beras PNS	1.190.729.640	1.163.644.560	27.085.080	2,33
Belanja Uang Makan PNS	3.161.426.000	2.821.278.000	340.148.000	12,06
Belanja Tunj. Umum PNS	811.820.000	703.870.000	107.950.000	15,34
Belanja Uang Lembur	357.417.000	522.884.000	(165.467.000)	(31,65)
Realisasi Belanja Bruto	34.707.464.269	33.334.368.132	1.373.096.137	4,12
Pengembalian Belanja	19.485.571	20.444.846	(959.275)	(4,69)
Realisasi Belanja Netto	34.687.978.698	33.313.923.286	1.374.055.412	4,12

Belanja Barang
Rp82.751.960.365

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp82.751.960.365 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp82.568.813.605. Penurunan realisasi belanja barang sebesar 0,22 persen antara lain disebabkan oleh pelaksanaan efisiensi dan *selfblocking* anggaran pada TA 2018.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11
Perbandingan Belanja Barang
Per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	31 DES 2018	31 DES 2017	Naik/ (Turun)	%
Belanja Barang Operasional	5.184.753.312	5.537.055.345	(352.302.033,00)	(6,36)
Belanja Barang Non Operasional	11.902.655.749	14.732.002.517	(2.829.346.768,00)	(19,21)
Belanja Barang Persediaan	3.273.832.902	2.767.233.735	506.599.167,00	-
Belanja Jasa	17.229.721.362	13.205.172.520	4.024.548.842,00	30,48
Belanja Pemeliharaan	6.720.068.926	5.156.892.952	1.563.175.974,00	30,31
Belanja Perjalanan Dinas DN	25.060.865.774	26.667.868.695	(1.607.002.921,00)	(6,03)
Belanja Perjalanan Dinas LN	13.400.340.830	14.577.391.391	(1.177.050.561,00)	(8,07)
Realisasi Belanja Bruto	82.772.238.855	82.643.617.155	128.621.700,00	0,16
Pengembalian Belanja	10.139.245	74.803.550	(64.664.305)	
Realisasi Belanja Netto	82.762.099.610	82.568.813.605	193.286.005,00	0,23

Belanja Modal
Rp11.704.425.195

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp11.704.425.195 dan Rp16.266.782.995. Penurunan

realisasi Belanja Modal sebesar 28.05 persen disebabkan oleh pembelian kendaraan operasional yang dilaksanakan pada tahun 2017.

Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	31 DES 2018	31 DES 2017	Naik/ (Turun)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.296.353.320	15.385.702.495	(7.089.349.175)	(46,08)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.993.549.515	721.398.000	1.272.151.515	176,35
Belanja Modal Lainnya	1.414.522.360	159.682.500	1.254.839.860	785,83
Realisasi Belanja Bruto	11.704.425.195	16.266.782.995	(4.562.357.800)	(28,05)
Pengembalian Belanja	0	0	-	-
Realisasi Belanja Netto	11.704.425.195	16.266.782.995	(4.562.357.800)	(28,05)

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp8.296.353.320

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8.296.353.320 yang terdiri dari pembelian sebesar Rp4.761.542.282, Pengembangan Aset Langsung sebesar Rp195.910.000 dan Pengembangan Aset KDP sebesar Rp3.338.901.038

B.2.3.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp1.993.549.515

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.993.549.515 yang terdiri dari Aset Tetap Renovasi sebesar Rp1.914.331.915 dan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp79.217.600

B.2.3.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja
Modal Lainnya
Rp1.414.522.360

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.414.522.360 yang terdiri dari Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Tetap Tak Berwujud.

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp68.463.360 yang terdiri dari Pembelian sebesar Rp67.075.360 dan Aset Tetap Renovasi sebesar Rp1.388.000.

Realisasi Belanja Aset Tetap Tak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.346.059.000 yang terdiri dari Pembelian sebesar Rp1.166.099.000 dan Pengembangan Langsung sebesar Rp179.960.000.

B.3. Catatan Penting Lainnya

B.3.1 Penerimaan Hibah Luar Negeri BKF

1. Hibah *Technical Assistance* ADB 8858-INO: *Strengthening Knowledge Sharing in Indonesia*

Dalam rangka meningkatkan kegiatan *knowledge sharing* dalam penyusunan kebijakan di Indonesia, Asian Development Bank (ADB) berkomitmen memberikan hibah kepada Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sebagai Executing Agency dalam bentuk *Technical Assistance* (TA) ADB 8858-INO: *Strengthening Knowledge Sharing in Indonesia* senilai USD725,000 untuk jangka waktu Desember 2014 hingga Desember 2017.

TA ini bertujuan meningkatkan kapabilitas *knowledge sharing* di Indonesia, dengan menyediakan *responses to just-in-time knowledge request* melalui konsultan ADB dan konsultan yang diusulkan oleh Kementerian Keuangan dan BAPPENAS. TA ini juga bertujuan mendesiminasi hasil publikasi kebijakan Kementerian Keuangan dan BAPPENAS, termasuk penyelenggaraan seminar/workshop dengan topik yang menjadi *key policy* dan *sector issues*.

Hibah TA ini berlaku efektif di Kementerian Keuangan sebagai *Implementing Agency* mulai Desember 2015 hingga Desember 2017 yang telah diperpanjang hingga Juni 2019, dan telah mendapat register dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan nomor 21SRT4Y3. Pada Semester II Tahun Anggaran 2018, hibah TA ini sudah melakukan pengesahan penerimaan di KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah sebesar Rp155.981.923, kemudian setelah mendapat persetujuan pengesahan dari KPPH Khusus Pinjaman dan Hibah, dana hibah tersebut telah disetorkan ke kas negara.

2. Hibah Proyek *Sustainable Development Financing* (SDF)

Proyek SDF bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Indonesia dalam efektivitas implementasi kegiatan-kegiatan lingkungan terkait mitigasi dan adaptasi perubahan lingkungan, serta biodiversity.

Beberapa kegiatan yang dibiayai dari hibah SDF adalah sebagai berikut (i) pelaksanaan *technical assistance* yang meliputi kegiatan *knowledge sharing* dan penyusunan laporan, (ii) pelaksanaan sosialisasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dihadiri oleh stakeholder terkait termasuk kementerian/lembaga yang mendapatkan mandat untuk melaksanakan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, (iii) penyusunan kembali buku *climate budget tagging (updating)*, (iv) memfasilitasi koordinasi lintas kementerian/lembaga yang terkait dengan kegiatan mitigasi dan

adaptasi perubahan iklim, (v) pengembangan sumber daya manusia (*capacity building*) seperti mengikuti workshop/pelatihan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Bangladesh, mengikuti pertemuan internasional untuk membahas perkembangan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, (vi) pelaksanaan rekonsiliasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk penandaan anggaran (*budget tagging*) pada aplikasi KRISNA (kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran), (vii) pengembangan *budget tagging* pada tingkat daerah, (viii) dukungan melakukan reviu atas laporan mitigasi perubahan iklim, dan (ix) penyusunan *green framework* untuk penerbitan *green sukuk*.

Proyek akan dilaksanakan di bawah tanggung jawab Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, dengan anggaran sebesar USD620,000 untuk periode September 2014 – Agustus 2017 yang berasal dari UNDP serta telah mendapat register dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan nomor 2Q36JPE4. Pada Semester II Tahun Anggaran 2018, hibah ini telah melakukan pengesahan realisasi di KPPN sebesar Rp2.209.437.657.

3. Hibah Program *Biodiversity Finance Initiative* (BIOFIN)

BIOFIN merupakan upaya kemitraan global untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pembiayaan keanekaragaman hayati. Inisiatif ini merupakan platform multi-stakeholders yang melibatkan lintas kementerian. Di Indonesia, Kementerian Keuangan, dalam hal ini Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, menjadi leading unit untuk kegiatan-kegiatan BIOFIN.

Beberapa kegiatan yang dibiayai dari hibah BIOFIN adalah sebagai berikut (i) penyelesaian *final workbook* 1a dan 1b mengenai analisis terhadap kebijakan dan kelembagaan terkait keanekaragaman hayati (kehati), (ii) penyelesaian *final workbook* 3 mengenai kajian belanja kehati, (iii) penyusunan *workbook* 2 mengenai analisis kebutuhan pembiayaan kehati dan *workbook* 3 mengenai perencanaan pembiayaan kehati, (iv) pengembangan sumber daya manusia dengan mengikuti berbagai pertemuan internasional, dan (v) memfasilitasi koordinasi lintas kementerian/lembaga.

Hibah ini diberikan oleh UNDP dengan nilai komitmen sebesar USD1,000,000 untuk periode November 2013 – November 2018 dan telah mendapat register dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan nomor 251YQ1FA. Pada Semester II Tahun Anggaran 2018, hibah ini telah melakukan pengesahan realisasi di KPPN sebesar Rp3.358.966.303.

4. Hibah *Technical Assistance on Promoting Innovative Financial Inclusion* Nomor TA 9333-INO (TA PIFI)

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah mengadakan pinjaman *Financial Market Development and Inclusion Program* (FMDIP) dari Asian Development Bank (ADB). FMDIP memiliki 3 (tiga) output, yaitu: penguatan struktur regulasi stabilitas keuangan, pendalaman sektor keuangan, dan peningkatan keuangan inklusif. Selanjutnya, dalam rangka mendukung implementasi dari output 3 FMDIP, ADB memberikan hibah TA PIFI.

Dalam TA PIFI tersebut, yang bertindak selaku Executing Agency adalah Badan Kebijakan Fiskal (BKF), sedangkan yang bertindak selaku *Implementing Agency* (IA) adalah BKF dan Otoritas Jasa Keuangan. Total biaya TA PIFI diestimasikan sebesar USD1 juta, yang terdiri dari USD800.000 bersumber dari TASF dan USD200.000 bersumber dari Executing Agency Pemerintah Indonesia (berupa *staff resource, office accommodation, dan secretariat assistance*). Lebih lanjut, 70% hibah (USD560.000) akan dialokasikan untuk BKF.

TA PIFI telah mendapatkan penetapan nomor register dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan nomor register 2UL5W29A yang berlaku efektif mulai tanggal 19 September 2017 dan mempunyai *closing date* 30 Juni 2019. Pada Semester II Tahun Anggaran 2018, hibah ini telah melakukan pengesahan realisasi di KPPN sebesar Rp75.308.140.

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Aset Lancar

Rp2.338.269852

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.338.269852 dan Rp4.059.172.408. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Badan Kebijakan Fiskal per 31 Desember 2018 dan 2017 dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 13

Rincian Aset Lancar

Per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Aset Lancar	31 DES 2018	31 DES 2017
1	Kas Lainnya dan Setara Kas	5.238.830	3.002.038.903
2	Piutang Bukan Pajak	8.995.407	17.990.765
3	Persediaan	2.324.035.615	1.039.142.740
	Jumlah	2.338.269.852	4.059.172.408

Kas Lainnya dan

Setara Kas

Rp5.238.830

C.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp5.238.830 dan Rp3.002.038.903 yang merupakan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran. Jumlah tersebut berasal dari Kas lainnya tersebut berasal dari kelebihan selisih dari penukaran valas HLUL ADB 8858-INO pada bulan Desember 2018 dengan nilai HLUL yang dicatat pada saat masuk rekening BKF pada bulan Maret 2018 sebesar Rp5.238.830 (Rp161.220.753-Rp155.981.923).

Per tanggal 31 Desember 2018 nilai ini dicatat sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran karena belum disetor menunggu kepastian akun untuk penyetorannya. Kelebihan pendapatan hibah tersebut disetor ke kas negara dengan akun 425997-Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan pada tanggal 22 Januari 2019 setelah mendapat arahan dari Direktorat APK melalui nota dinas nomor ND-56/PB/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Akun Penyetoran Kelebihan Pendapatan Hibah ke Kas Negara.

Piutang Bukan

Pajak

Rp8.995.407

C.1.3. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan pajak per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp8.995.407 dan Rp17.990.165. Adapun nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang PNBPN adalah sebesar (Rp45.203). Piutang bukan pajak merupakan piutang atas kelebihan pembayaran belanja pegawai tahun

yang lalu atas pegawai tugas belajar karena kesalahan perhitungan pembayaran.

Piutang PNBP merupakan jumlah penerimaan Negara bukan pajak yang terutang ditentukan dengan cara ditetapkan oleh Instansi Pemerintah dan dihitung sendiri oleh wajib pajak. Penetapan jumlah PNBP yang terutang oleh instansi pemerintah kedaluwarsa setelah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya PNBP.

Persediaan

Rp2.324.035.615

C.1.4. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp2.324.035.615 dan Rp1.039.142.740. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 disajikan pada tabel berikut:

*Tabel 14
Rincian Persediaan
Per 31 Desember 2018 dan 2017*

No.	Uraian	31 DES 2018	31 DES 2017
1	Barang Konsumsi	2.254.822.807	1.008.457.712
2	Barang untuk Pemeliharaan	69.212.808	30.685.028
Jumlah		2.324.035.615	1.039.142.740

Semua jenis persediaan pada tanggal tersebut berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap

Rp31.035.785.125

C.2. Aset Tetap

Saldo Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp31.035.785.125 dan Rp29.321.589.853 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian aset tetap Badan Kebijakan Fiskal per 31 Desember 2018 dan 2017 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 15
Rincian Aset Tetap
Per 31 Desember 2018 dan 2017

c	Uraian	31 DES 2018	31 DES 2017
1	Tanah	2.598.368.000	2.598.368.000
2	Peralatan dan Mesin	94.817.604.947	90.258.600.917
3	Gedung dan Bangunan	2.959.470.000	2.959.470.000
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	1.257.708.832	1.257.708.832
5	Aset Tetap Renovasi	1.915.719.915	-
6	Aset Tetap Lainnya	552.041.449	484.966.089
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	79.217.600	-
Jumlah		104.180.130.743	97.559.113.838
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(73.144.345.618)	(68.237.523.985)
Nilai Buku Aset Tetap		31.035.785.125	29.321.589.853

C.2.1. Tanah

Tanah
Rp2.598.368.000

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Kebijakan Fiskal per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.598.368.000.

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2018 dan 2017 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 16
Rincian Tanah
Per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Uraian	31 DES 2018	31 DES 2017
1	Tanah Persil	2.510.091.000	2.510.091.000
2	Lapangan	88.277.000	88.277.000
Jumlah		2.598.368.000	2.598.368.000

Tabel 17
Rincian Saldo Tanah
Per 31 Desember 2018

No.	Kode Barang	Lokasi	Luas m2	Nilai
1	2010102003	Kayuringin Jaya Kav. No. B-50-A1, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi.	290	2.204.518.000
2	2010102003	Kayuringin Jaya Kav. No. B-50-306, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi.	45	305.573.000
3	2010307009	Kayuringin Jaya Kav. No. B-50-306, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi.	13	88.277.000
Jumlah			348	2.598.368.000

Saldo Tanah milik BKF per 31 Desember 2018 seluas 348 m² / Rp2.598.368.000 terdiri dari 2 kelompok, yaitu Tanah Persil dan Lapangan.

Tanah persil sendiri terdiri dari 2 bidang, yaitu Tanah Bangunan Gudang seluas 290 m² / Rp2.204.518.000. yang berlokasi di Kayuringin Jaya Kav. No.

B-50-A1, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi digunakan sebagai gedung Arsip BKF dan Tanah Bangunan Gudang seluas 45 m² / Rp305.573.000 yang berlokasi di Kayuringin Jaya Kav. No. B-50-306, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi dihuni oleh Saudara Hardi berdasarkan Surat Sekretaris BKF No. S-226/KF.1/2008 tanggal 5 September 2008. Terdapat koreksi luas tanah pada aset tanah bangunan garasi sebesar 15 m² setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penyesuaian sertifikat tanah.

Sedangkan untuk kelompok Lapangan terdiri dari 1 sub-sub kelompok yaitu Tanah untuk Jalan Khusus/Komplek seluas 13 m² / Rp88.277.000 yang berlokasi di Kayuringin Jaya Kav. No. B-50-306, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi.

Rincian Penambahan Nilai Tanah Hasil Revaluasi per 31 Desember 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 18
Rincian Penambahan Nilai Tanah Hasil Revaluasi
Per 31 Desember 2018

No.	Kode Barang	Lokasi	Luas m2	Nilai
1	2010102003	Kayuringin Jaya Kav. No. B-50-A1, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi.	290	2.204.518.000
2	2010102003	Kayuringin Jaya Kav. No. B-50-306, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi.	45	305.573.000
3	2010307009	Kayuringin Jaya Kav. No. B-50-306, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi.	13	88.277.000
Jumlah			348	2.598.368.000

Peralatan dan

Mesin

Rp94.817.604.947

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp94.817.604.947 dan Rp90.258.600.917. Penambahan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2017	Rp. 90.258.600.917
Mutasi Tambah:	
- Penambahan Saldo Awal	Rp. 0
- Pembelian	Rp. 4.761.542.282
- Transfer Masuk	Rp. 0
- Pengembangan Aset Langsung	Rp. 195.910.000
- Pengembangan Aset Melalui KDP	Rp. 3.338.901.038
- Koreksi Nilai Bertambah	Rp. 62.824.400
Mutasi Kurang	
- Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp. 3.800.173.690
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp. 0
Saldo Per 31 Desember 2018	Rp. 94.817.604.947
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	Rp. 72.475.697.179
Nilai Buku Per 31 Desember 2018	Rp. 22.341.907.768

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin sebagai berikut:

Transaksi Penambahan dari Pembelian

Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp.	3.520.000
Alat Kantor	Rp.	1.408.288.400
Alat Rumah Tangga	Rp.	770.440.132
Alat Studio	Rp.	25.616.250
Alat Komunikasi	Rp.	8.500.000
Komputer Unit	Rp.	1.807.214.000
Peralatan Komputer	Rp.	737.963.500
Jumlah	Rp.	4.761.542.282

Transaksi Penambahan dari Pengembangan Langsung

Alat Kantor	Rp.	195.910.000
Jumlah	Rp.	195.910.000

Transaksi penambahan dari pengembangan langsung merupakan pengembangan aset tetap pintu magnetic akses BKF yang sebelumnya telah diadakan dengan penambahan kapasitas scanning kartu magnetic.

Transaksi Penambahan dari Pengembangan melalui KDP:

Alat Bantu	Rp.	3.338.901.038
Jumlah	Rp.	3.338.901.038

Transaksi pengembangan melalui KDP merupakan pengembangan elevator/lift yang dilakukan melalui pengadaan pekerjaan konstruksi

Transaksi Penambahan dari Koreksi Nilai Bertambah:

Alat Bantu	Rp.	62.824.400
Jumlah	Rp.	62.824.400

Transaksi Pengurangan dari Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya

Alat Bantu	Rp.	139.489.099
Alat Kantor	Rp.	390.307.352
Alat Rumah Tangga	Rp.	517.833.971
Alat Studio	Rp.	29.700.000
Alat Komunikasi	Rp.	80.652.000
Komputer Unit	Rp.	1.739.759.467
Peralatan Komputer	Rp.	902.431.801
Jumlah	Rp.	3.800.173.690

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp2.959.470.000*

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp2.959.470.000. Tidak terdapat mutasi nilai gedung dan bangunan pada tahun anggaran 2018. Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

*Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp1.257.708.832*

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.257.708.832. Tidak terdapat mutasi nilai jalan irigasi dan jaringan pada tahun anggaran 2018.

Nilai buku jalan, irigasi, dan jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp723.138.061 yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp534.570.771.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Renovasi

*Aset Tetap
Renovasi
Rp1.915.719.915*

Saldo Aset Tetap Renovasi Per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp1.915.719.915 dan Rp0. Aset Tetap Renovasi Per 31 Desember 2018 merupakan belanja modal pekerjaan renovasi gedung milik Setjen yang digunakan oleh BKF. Aset Tetap Renovasi direncanakan akan diserahkan kepada Setjen pada TA 2019.

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp79.217.600*

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp79.217.600 dan Rp0. Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2018 merupakan Belanja Modal yang digunakan pada tahap perencanaan pada tahun 2018 dan eksekusi pekerjaan akan dilaksanakan pada tahun 2019.

C.2.7. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap Lainnya
Rp552.041.449*

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp552.041.449 dan Rp484.966.089 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan.

Saldo per 31 Desember 2017	Rp.	484.966.089
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp.	67.075.360
- Transfer Masuk	Rp.	-
Mutasi kurang:		
- Koreksi pencatatan nilai/kuantitas	Rp.	-
- Reklasifikasi Keluar	Rp.	-
- Transfer Keluar	Rp.	-
Saldo Per 31 Desember 2018	Rp.	552.041.449
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	Rp.	63.857.331
Nilai Buku Per 31 Desember 2018	Rp.	488.184.118

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya sebagai berikut:

Transaksi Penambahan dari Pembelian

Bahan Perpustakaan Tercetak	Rp.	59.864.860
Lukisan Kanvas	Rp.	7.210.500
Jumlah	Rp.	67.075.360

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini

C.2.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akm. Penyusutan
Aset Tetap
Rp73.144.345.618.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah Rp73.144.345.618. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 tersaji pada Tabel 19.

Tabel 19
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2018

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	94.817.604.947	72.475.697.179	22.341.907.768
2	Gedung dan Bangunan	2.959.470.000	134.077.668	2.825.392.332
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.257.708.832	534.570.771	723.138.061
4	Aset Tetap Renovasi	1.915.719.915	-	1.915.719.915
5	Aset Tetap Lainnya	552.041.449	-	552.041.449
	Akumulasi Penyusutan	101.502.545.143	73.144.345.618	28.358.199.525

Aset Lainnya
Rp2.889.274.599

C.3. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.889.274.599 dan Rp2.598.726.500 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersebut terdiri dari:

Tabel 20
Rincian Aset Lainnya
Per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Uraian	31 DES 2018	31 DES 2017
1	Aset Tak Berwujud	2.277.280.500	931.221.500
2	Aset Lain-Lain	611.994.099	1.667.505.000
	Jumlah	2.889.274.599	2.598.726.500
	Akumulasi Penyusutan	1.693.752.045	2.460.789.750
	Nilai Buku	1.195.522.554	137.936.750

Aset Tak Berwujud
Rp2.277.280.500

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak berwujud per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.277.280.500 dan Rp931.221.500. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Kebijakan Fiskal berupa *software* komputer yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Adapun rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 21
Rincian Aset Tak Berwujud
Per 31 Desember 2018

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	2.277.280.500
	Jumlah	2.277.280.500

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	Rp.	931.221.500
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp.	1.166.099.000
- Pengembangan Langsung	Rp.	179.960.000
Mutasi kurang:		
- Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lain	Rp.	0
Nilai perolehan per 31 Desember 2018	Rp.	2.277.280.500
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018	Rp.	1.081.757.946
Nilai Buku per 31 Desember 2018	Rp.	1.195.522.554

Aset Lain-Lain
Rp611.994.099

C.3.2. Aset Lain-Lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp611.994.099 dan Rp1.667.505.000. Aset lain-lain adalah Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Kebijakan Fiskal.

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	Rp.	1.667.505.000
Mutasi tambah:		
- Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lain	Rp.	3.800.173.690
Mutasi kurang:		
- Pencatatan Barang yang mau dihapuskan	Rp.	4.855.684.591
Nilai perolehan per 31 Desember 2018	Rp.	611.994.099
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018	Rp.	611.994.099
Nilai Buku per 31 Desember 2018	Rp.	0

Transaksi penambahan dari reklasifikasi aset tetap ke aset lain

Alat Bantu	Rp.	139.489.099
Alat Kantor	Rp.	390.307.352
Alat Rumah Tangga	Rp.	517.833.971
Alat Studio	Rp.	29.700.000
Alat Komunikasi	Rp.	80.652.000
Komputer Unit	Rp.	1.739.759.467
Peralatan Komputer	Rp.	902.431.801
Jumlah	Rp.	3.800.173.690

Transaksi pengurangan dari usulan barang rusak berat ke pengelola

Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp.	1.195.000.000
Alat Kantor	Rp.	390.307.352
Alat Rumah Tangga	Rp.	517.833.971
Alat Studio	Rp.	29.700.000
Alat Komunikasi	Rp.	80.652.000
Komputer Unit	Rp.	1.739.759.467
Peralatan Komputer	Rp.	902.431.801
Jumlah	Rp.	4.855.684.591

C.3.3. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akm. Penyusutan
Aset lainnya
Rp2.889.274.599.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 adalah Rp2.889.274.599.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Tabel 22
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Per 31 Desember 2018

No.	Uraian	31 DES 2018	31 DES 2017
1	Aset Tak Berwujud	2.277.280.500	931.221.500
2	Aset Lain-Lain	611.994.099	1.667.505.000
	Jumlah	2.889.274.599	2.598.726.500
	Akumulasi Penyusutan	1.693.752.045	2.460.789.750
	Nilai Buku	1.195.522.554	137.936.750

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Utang kepada
Pihak ketiga
Rp18.189.235

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp18.189.235 dan Rp2.867.175433. Jumlah tersebut berasal dari tagihan listrik, Telkom dan PDAM pemakaian periode Desember 2018 yang tagihannya baru ditagihkan pada bulan Januari 2019.

D. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN OPERASIONAL**Pendapatan**

Operasional

Rp15.638.830

D.1. PENDAPATAN OPERASIONAL

Nilai Pendapatan Operasional per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp15.638.830 dan Rp0.

Beban Operasional

Rp130.811.459.952

D.2. BEBAN OPERASIONAL

Nilai Beban Operasional per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp130.811.459.952 dan Rp133.278.748.596.

Beban Pegawai

Rp34.679.325.630

D.2.1. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp34.679.325.630 dan Rp33.317.967.100. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian beban pegawai untuk Per 31 Desember 2018 dan 2017 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 23
Rincian Beban Pegawai
Per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	31 DES 2018	31 DES 2017	Naik/ (Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	23.567.388.080	23.167.425.500	399.962.580	1,73
Belanja Pembulatan Gaji PNS	334.558	326.704	7.854	2,40
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.609.269.790	1.455.879.430	153.390.360	10,54
Belanja Tunj. Anak PNS	446.865.490	401.979.458	44.886.032	11,17
Belanja Tunj. Struktural PNS	1.928.880.000	1.668.520.000	260.360.000	15,60
Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.476.900.000	1.332.400.000	144.500.000	10,85
Belanja Tunj. PPh PNS	148.180.261	100.394.294	47.785.967	47,60
Belanja Tunj. Beras PNS	1.190.729.640	1.163.644.560	27.085.080	2,33
Belanja Uang Makan PNS	3.161.426.000	2.821.278.000	340.148.000	12,06
Belanja Tunj. Umum PNS	811.640.000	703.680.000	107.960.000	15,34
Belanja Uang Lembur	357.417.000	522.884.000	(165.467.000)	(31,65)
Realisasi Belanja Bruto	34.699.030.819	33.338.411.946	1.360.618.873	4,08
Pengembalian Belanja	19.485.571	20.444.846	(959.275)	(4,69)
Realisasi Belanja Netto	34.679.545.248	33.317.967.100	1.361.578.148	4,09

Beban Persediaan

Rp1.880.458.662

D.2.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.880.458.662 dan Rp2.386.973.846. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian beban persediaan untuk Per 31 Desember 2018 dan 2017 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 24
Rincian Beban Persediaan
Per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	31 DES 2018	31 DES 2017	Naik/ (Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	1.880.458.662	2.386.973.846	(506.515.184)	(21,22)
Realisasi Belanja Netto	1.880.458.662	2.386.973.846	(506.515.184)	(21,22)

*Beban Barang dan
Jasa*
Rp39.976.127.058

D.2.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp39.976.127.058 dan Rp42.493.593.770. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian beban jasa untuk Per 31 Desember 2018 dan 2017 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 25
Rincian Beban Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	31 DES 2018	31 DES 2017	Naik/ (Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	3.727.067.630	3.742.623.048	(15.555.418)	(0,42)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	17.280.682	25.945.300	(8.664.618)	(33,40)
Beban Honor Operasional Satuan kerja	1.177.500.000	1.165.270.000	12.230.000	1,05
Beban Barang Operasional Lainnya	262.905.000	603.216.997	(340.311.997)	(56,42)
Beban Bahan	5.473.056.011	6.359.818.738	(886.762.727)	(13,94)
Beban Honor Output Kegiatan	4.397.290.000	6.129.248.500	(1.731.958.500)	(28,26)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.032.309.738	2.172.935.279	(140.625.541)	(6,47)
Beban Langganan Listrik	24.671.900	17.022.900	7.649.000	44,93
Beban Langgan Telepon	144.557.607	103.798.646	40.758.961	39,27
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	126.118.818	-	126.118.818	-
Beban Langganan Air	978.800	821.000	157.800	19,22
Beban Jasa Konsultan	197.500.000	219.000.000	(21.500.000)	(9,82)
Beban Sewa	1.693.412.222	1.813.231.869	(119.819.647)	(6,61)
Beban Jasa Profesi	2.482.220.000	2.791.296.410	(309.076.410)	(11,07)
Beban Jasa Lainnya	18.219.258.650	17.371.740.884	847.517.766	4,88
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	6.954.200	(6.954.200)	100,00
Realisasi Belanja Bruto	39.976.127.058	42.522.923.771	(2.546.796.713)	(5,99)
Pengembalian Belanja		29.330.001	(29.330.001)	(100,00)
Realisasi Belanja Netto	39.976.127.058	42.493.593.770	(2.517.466.712)	(5,92)

*Beban
Pemeliharaan*
Rp6.891.882.326

D.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp6.891.882.326 dan Rp5.355.309.016. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk Per 31 Desember 2018 dan 2017 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 26
Rincian Beban Pemeliharaan
Per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	31 DES 2018	32 DES 2017	Naik/ (Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	961.067.921	1.077.150.536	(116.082.615)	(12,08)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.242.595.005	2.759.146.766	2.483.448.239	47,37
Beban Pemeliharaan Jaringan	121.187.000	1.039.043.500	(917.856.500)	(757,39)
Beban Pemeliharaan Lainnya	55.354.200	42.625.000	12.729.200	23,00
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	511.678.200	437.343.214	74.334.986	14,53
Realisasi Belanja Netto	6.891.882.326	5.355.309.016	1.536.573.310	22,30

Beban Perjalanan Dinas
Rp38.451.067.359

D.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp38.451.067.359 dan Rp41.123.365.298. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Per 31 Desember 2018 dan 2017 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 27
Rincian Beban Perjalanan Dinas
Per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	31 DES 2018	32 DES 2017	Naik/ (Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	10.224.478.525	8.361.103.797	1.863.374.728	22,29
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.193.242.000	1.464.272.500	(271.030.500)	(18,51)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.275.384.955	9.622.541.130	(3.347.156.175)	(34,78)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.367.760.294	7.143.530.030	224.230.264	3,14
Beban Perjalanan Biasa-Luar Negeri	439.204.178	96.343.415	342.860.763	100,00
Beban Perjalanan Lainnya-Luar Negeri	12.961.136.652	14.481.047.976	(1.519.911.324)	(10,50)
Realisasi Belanja Bruto	38.461.206.604	41.168.838.848	-2.707.632.244	(6,58)
Pengembalian Belanja	10.139.245	45.473.550	(35.334.305)	(77,70)
Realisasi Belanja Netto	38.451.067.359	41.123.365.298	-2.672.297.939	(6,50)

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp8.932.644.119

D.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp8.932.644.119 dan Rp8.601.584.768. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2018 dan 2017 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 28
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	31 DES 2018	31 DES 2017	Naik/ (Turun)	%
B. Penyusutan Peralatan dan Mesin	8.525.843.057	8.349.220.545	176.622.512	2,12
B. Penyusutan Gedung dan Bangunan	89.385.112	74.549.532	14.835.580	19,90
B. Penyusutan Jaringan	28.942.754	28.942.754	-	0,00
B. Amortisasi Software	288.473.196	148.871.937	139.601.259	0,00
Realisasi Belanja Netto	8.932.644.119	8.601.584.768	191.458.092	2,23

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Tertagih
(Rp45.202)

D.2.7. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar (Rp45.202) dan (Rp45.203). Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Per 31 Desember 2018 dan 2017 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 29
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	31 DES 2018	31 DES 2017	Naik/ (Turun)	%
B. Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(45.202)	(45.203)	1	(0,00)
Realisasi Belanja Netto	(45.202)	(45.203)	1	(0,00)

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp921.496.435

D.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 30
Rincian Surplus/Defisit
Per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	31 DES 2018	31 DES 2017	Naik/ (Turun)	%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	443.596.000	1.171.566.561	(727.970.561)	(164,11)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		423.635.683	(423.635.683)	-
Surplus/ (Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar	443.596.000	747.930.878	(304.334.878)	(68,61)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	619.011.887	726.068.966	(107.057.079)	(17,29)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	141.111.452	6.919.424	134.192.028	95,10
Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	477.900.435	719.149.542	(241.249.107)	(50,48)
Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	921.496.435	1.467.080.420	(545.583.985)	(59,21)

E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp18.434.817.884

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp30.651.523.578 Rp18.434.817.884.

Surplus(defisit) LO

(Rp129.874.324.687)

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah defisit sebesar (Rp129.874.324.687) dan (Rp131.811.688.176). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

Jumlah Penyesuaian

Nilai Tahun Berjalan

Rp0

E.3. Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan

Jumlah Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Yang

Menambah/

Mengurangi Ekuitas

Rp0

E.4. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Jumlah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp1.852.710.055 Nilai ini berasal dari Selisih Revaluasi Aset dan Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi.

Koreksi Nilai Aset

Non Revaluasi Rp0

E.4.1. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi nilai aset non revaluasi berasal dari koreksi atas transaksi aset tetap non revaluasi dan aset lainnya non revaluasi.

Transaksi Antar

Entitas

Rp133.774.189.405

E.5. Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi Antar Entitas periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp133.774.189.405 dan Rp142.175.663.815.

Kenaikan/ Penurunan

Ekuitas

Rp3.889.864.718

E.6. Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Jumlah Kenaikan/Penurunan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp3.889.864.718 dan 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar adalah 12.216.705.694.

Ekuitas Akhir

Rp34.551.388.296

E.7. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir merupakan selisih antara Ekuitas Awal (setelah ditambah dengan Surplus/(Defisit) LO) dengan transaksi atas entitas. Jumlah Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp34.551.388.296 dan Rp30.651.523.578.

F. PENGUNGKAPAN – PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Tuntutan Ganti Rugi

Kepala Badan Kebijakan Fiskal pada Tahun 2017 menetapkan kerugian negara berdasarkan Surat Penetapan Kerugian Negara sebesar Rp56.250.000 a.n. Ahmad Bahri Rambe.

Sekretaris BKF telah mengusulkan penerbitan Surat Pemberitahuan Ganti Rugi (SPGR) melalui surat kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan (Rocankeu) nomor SR-16/KF.1/2017 tanggal 24 Oktober 2017 hal Usulan Penerbitan SPGR a.n. Sdr. Ahmad Bahri Rambe.

Hingga akhir tahun 2018 Sdr. Ahmad Bahri Rambe belum berhasil dihubungi, baik melalui sambungan telepon ataupun pada alamat sesuai data yang ada di BKF, tetapi dalam media sosial Facebook masih aktif.

Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara (TAPKN) Rocankeu telah melakukan rapat pembahasan usulan penerbitan SPGR dan merekomendasikan untuk melakukan perbaikan dasar penetapan dan besaran nilai kerugian negara a.n. Sdr. Ahmad Bahri Rambe melalui surat Kepala Rocankeu nomor S-226/SJ.1/2018 tanggal 18 Mei 2018.

Pada tanggal 5 Juni 2018 telah dilakukan pertemuan antara wakil dari BKF, Biro Perencanaan dan Keuangan serta Biro SDM dan disepakati bahwa diperlukan surat penegasan dari Biro SDM mengenai perhitungan kerugian negara dimaksud, khususnya mengenai masa wajib kerja yang digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian negara.

Sekretaris BKF melalui Surat Nomor S-327/KF.1/2018 tanggal 25 Juni 2018 telah menyampaikan perbaikan besaran serta simulasi perhitungan kerugian negara a.n. Ahmad Bahri Rambe kepada Biro SDM untuk mendapatkan surat penegasan penetapan besaran kerugian negara.

Biro SDM melalui surat SR-386/SJ.5/2018 tanggal 3 September 2018 hal tanggapan atas Penyelesaian Besaran Kerugian Negara Sdr. Ahmad Bahri Rambe, menyampaikan besaran nilai kerugian negara yang diperhitungkan adalah sebesar Rp15.208.333.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 508/KMK.01/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.01/2014 dalam Proses Penyelesaian Tuntutan Ganti rugi perlu ditetapkan nilai kerugian negara melalui surat penetapan nilai kerugian negara.

Saat ini surat penetapan nilai kerugian negara dengan perhitungan yang baru atas nama Sdr. Ahmad Bahri Rambe masih dalam proses penetapan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal.

Pada Tahun 2018 juga terdapat Piutang TGR a.n. Sdr. M. Fauzi Agustian sebesar Rp48.542.400 telah dilunasi melalui penyetoran ke kas negara sebesar Rp48.542.400 yang dilakukan pada tanggal 20 Juli 2018 dengan bukti Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) CD60271LO3EHF3O2



**BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN RI**

Gd. R.M. Notohamiprodjo
Jln. Dr. Wahidin No 1
Jakarta Pusat 10710

